



# Kurangi Mobilitas

**JAKARTA**—Pemerintah mengimbau warga untuk mengurangi mobilitas untuk mengurangi risiko penularan varian baru Covid-19 Omicron yang lebih cepat menular.

Sunartono, Ujang Hasanudin, & David Kurniawan  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

- ▶ Presiden Jokowi meminta masyarakat agar tidak berpergian ke luar negeri jika tidak ada urusan penting dan mendesak.
- ▶ Capaian vaksinasi lansia di DIY masih rendah di tengah program vaksinasi booster untuk melindungi kelompok rentan itu terutama dari varian Omicron.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di pusat keramaian dan jika bisa bekerja dari rumah (*work from home*/WFH). "Jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian, dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, *work from home* [WFH], lakukanlah kerja dari rumah," kata Presiden dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (18/1).

Presiden juga meminta masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Ia menjelaskan saat ini sedang terjadi tren kenaikan penularan kasus Covid-19 yang disebabkan Virus Corona Varian Omicron di Indonesia. Karena itu, masyarakat harus waspada namun tak perlu bereaksi berlebihan hingga menimbulkan ketakutan dan kepanikan.

Berbagai kajian dan laporan World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, kata Presiden, menyebutkan varian Omicron memiliki kemampuan lebih menular, kendatipun gejalanya lebih ringan.

"Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Tapi sekali lagi kita harus waspada. Jangan jemawa dan gegabah," ujar Presiden.

Pada Selasa ini, Kementerian Kesehatan menyampaikan kasus Omicron di Indonesia bertambah menjadi 840 kasus berdasarkan data terakhir pada Senin (17/1).

## Kurangi Mobilitas

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan perpanjangan pemberlakuan dua Instruksi Mendagri (Inmendagri) soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 varian Omicron.

"Dua Inmendagri ini merupakan panduan bagi daerah untuk lebih tanggap dan waspada serta melakukan langkah antisipasi yang ditindaklanjuti dengan kebijakan di daerah," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.

Dengan panduan tersebut, lanjut Safrizal, respons daerah untuk menekan jumlah kasus terpapar Covid-19 dapat dilakukan lebih terukur. Berdasarkan data yang ada, varian Omicron diprediksi dapat mencapai puncaknya pada pertengahan Februari sampai dengan awal Maret.

Sejumlah perubahan pada dua Inmendagri antara lain, perubahan level daerah serta pembatasan-pembatasan. *[selengkapnya lihat grafis]*

Pmda DIY akan memperketat penerapan aplikasi *Peduli Lindungi* pada sejumlah tempat publik seperti pusat perbelanjaan seiring dengan perpanjangan PPKM Level 2. Satpol PP menemukan masih banyak tempat publik yang sudah dilengkapi dengan *QR Code Peduli Lindungi*, tetapi tidak diterapkan.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan terkait dengan perpanjangan PPKM Level 2 DIY, anggotanya tetap pemantau di sejumlah tempat publik. Jika ditemukan adanya pelanggaran, akan diproses sesuai dengan mekanisme Pergub DIY No.24/2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Setiap hari sebelumnya sudah kami lakukan pengawasan mal, pusat perbelanjaan, menasar item PPKM level 2. Sesuai dengan Pergub 24/2021 jika terjadi pelanggaran teguran tertulis, pembinaan, penutupan 3x24 jam. Sudah

diterapkan," katanya, Selasa.

Ia menambahkan terkait dengan Inmendagri yang baru terbit terkait perpanjangan PPKM Level 2, menurutnya tidak jauh berbeda dengan aturan perpanjangan sebelumnya. Namun Satpol PP akan lebih mengencangkan penerapan aplikasi *Peduli Lindungi* karena banyak tempat usaha yang sudah memiliki QR Code tetapi tidak diterapkan.

### Vaksinasi Lansia

Sementara itu capaian vaksinasi lansia di DIY masih rendah di tengah program vaksinasi *booster* untuk melindungi kelompok rentan itu terutama dari varian Omicron. Dinas Kesehatan Gunungkidul mencatat tingkat vaksinasi untuk lansia masih rendah. Pasalnya, dari target 124.129 jiwa, yang sudah menyelesaikan suntikan dosis kedua baru sebanyak 70.750 lansia atau sebesar 57%.

Jumlah ini masih lebih rendah dari vaksinasi di Gunungkidul yang capaiannya untuk target warga di atas 12 tahun sudah mencapai 84,77%. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan faktor yang menyebabkan capaian belum maksimal salah satunya lansia membutuhkan pendampingan, sedangkan dari sisi luas wilayah dan kondisi geografis' juga memberikan pengaruh.

Selain itu, sambung Dewi, para lansia juga banyak memiliki penyakit bawaan, salah satunya hipertensi. "Darah tinggi seringkali menjadi kendala. Sudah beberapa kali datang ke lokasi, tapi tensinya masih tinggi sehingga gagal divaksin," katanya.

Di Bantul, Dinkes mengakui vaksinasi lansia di Bantul masih minim terutama untuk vaksin dosis ketiga atau *booster*. Saat kick off vaksinasi *booster* yang dilakukan di halaman Dinas Kesehatan pada Senin lalu, dari target 1.000 orang yang tervaksin hanya 180 orang.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Dinas

Kesehatan Bantul, Abednego Dani Nugroho, mengatakan vaksin *booster* untuk lansia dan pelayan publik baru dua hari lalu diluncurkan, sehingga pihaknya belum bisa menganalisa.

"Sehingga masih prematur kalau menentukan hasil analisisnya sekarang. Tapi *launching* kemarin itu yang di sentra vaksinasi Dinas Kesehatan cakupannya baru 180 orang dari kuota 1.000," kata Abednego.

Abednego mengaku capaian vaksinasi lansia khusus untuk dosis ketiga minim dikarenakan terkendala mobilitas dan juga keraguan dari sasaran, "Kemarin kalau saya melihat mungkin dari sisi peminatan saja. Mungkin karena teman-teman masih ragu untuk mengakses vaksinasi dosis ketiga ini," katanya

Menurut Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja, Lana Unwanah, salah satu kendala vaksin *booster* lansia berupa aksesibilitas. Perlu adanya pendamping lansia untuk datang ke tempat vaksinasi.

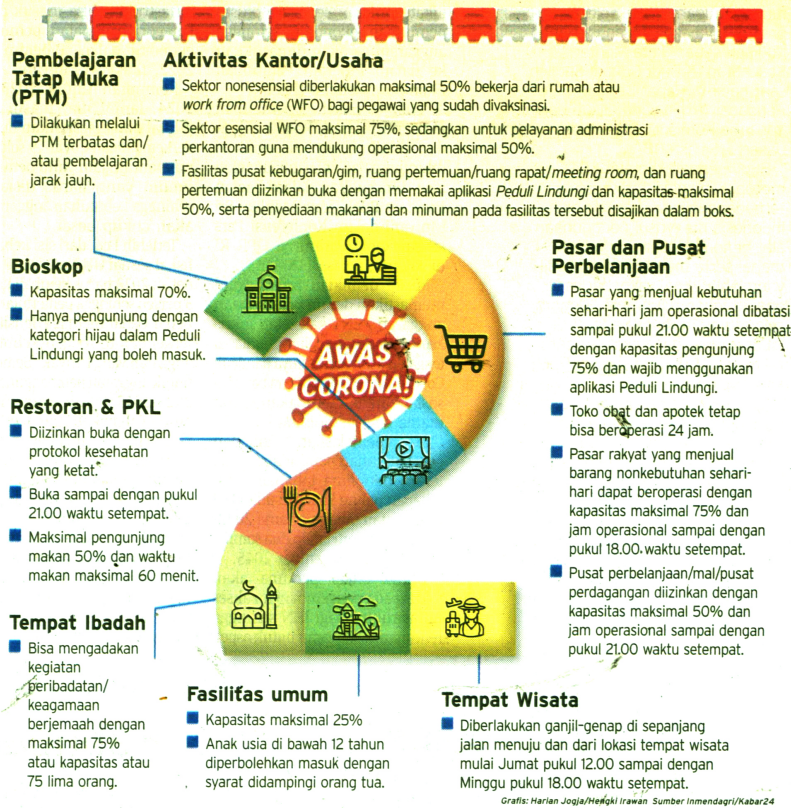
Setelah *kick-off*, Dinkes Kota Jogja masih menyiapkan untuk vaksinasi *booster*. "Masih proses penyiapan [vaksinasi *booster* lansia berikutnya]," kata Lana.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani mengatakan total lansia sebanyak 57.240 orang atau 13,8% dari total penduduk Kota Jogja. Namun sejauh ini yang telah memenuhi syarat dan terdaftar di aplikasi *Peduli Lindungi* sekitar 24.000 lansia.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Sleman, Khamidah Yulianti mengatakan sejak kick off vaksinasi *booster* bagi lansia digelar pada Rabu (12/1) sebanyak 541 lansia atau 0,4% yang divaksin. Adapun KIPi yang dialami lansia setelah divaksin *booster*, katanya juga masih ringan. Ia belum mendapatkan laporan adanya kasus KIPi yang berat atau diopname. *(Abdul Hamid Razak/Sirojul Khaifid/JIBI/Antara)*

## DIY PPKM Level 2

Pemerintah memutuskan sebagian besar wilayah di Jawa dan Bali berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 hingga 24 Januari 2022. Mengacu aturan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No.3/2022 tertanggal 17 Januari 2022 itu, seluruh masyarakat di DKI Jakarta, Banten, DIY, dan Bali wajib menerapkan aturan PPKM Level 2.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005